

## PERKEBUNAN DAN TRANSPORTASI EKSPLOITASI: PEMBANGUNAN JARINGAN KERETA API MENUJU BLITAR, 1884 - 1942

Nurhadi Sasmita (SINTA ID: 6663464)

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

[nurhadisasmita.sastra@unej.ac.id](mailto:nurhadisasmita.sastra@unej.ac.id)

### ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai korelasi positif antara perkembangan perkebunan di Blitar dengan dibangunnya jaringan kereta api. Persoalan menarik yang dikaji adalah: (1) bagaimana perkembangan perkebunan di daerah tersebut, seberapa besar produksinya? (2) bagaimana pengaruh perusahaan-perusahaan perkebunan terhadap pemerintah kolonial dalam membangun jalur kereta api di daerah tersebut? Pembahasannya merupakan narasi sejarah transportasi dengan teori modernisasi transportasi. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah bahwa: (1) kebijakan pintu terbuka oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdampak positif bagi Blitar dan sekitarnya karena banyak investor yang menanamkan modalnya di daerah tersebut; (2) tingginya produktivitas perkebunan di daerah Blitar dan sekitarnya mendorong Pemerintah Kolonial Belanda membangun jaringan kereta api; (3) kereta api menjadi moda transportasi yang efektif untuk melancarkan eksploitasi wilayah Blitar dan sekitarnya.

**Kata Kunci:** Blitar, perkebunan, kereta api, transportasi, eksploitasi

### ABSTRACT

*This article discusses the positive correlation between the development of plantations in Blitar and the construction of the railway network. The interesting issues studied are: (1) how is the development of plantations in the region, how big is the production? (2) how was the influence of plantation companies on the colonial government in railway lines building in the area? The discussion is a historical explanation of transportation with the theory of transportation modernization. The conclusions in this discussion are that: (1) the open door policy by the Dutch Colonial Government had a positive impact on Blitar and its surroundings because many investors invested in the region; (2) the high productivity of plantations in Blitar and its surroundings prompted the Dutch Colonial Government to a railway network building; (3) the train becomes an effective mode of transportation to expedite the exploitation of the Blitar region and its surroundings.*

**Keywords:** Blitar, plantation, railway, transportation, exploitation

## PENDAHULUAN

Daerah Blitar ke timur, sampai daerah Malang, topografinya amat beragam. Ada bagian daerah yang datar, dan sebagian besar lainnya berbukit-bukit, bahkan ada tebingnya yang terjal. Selain itu juga dilintasi oleh beberapa aliran sungai, besar dan kecil, yang kemudian menjadi sumber irigasi dan pembangkit listrik. Oleh sebab itu jalan raya yang telah dibangun sejak jaman kolonial Belanda untuk menghubungkan kedua daerah tersebut harus naik-turun perbukitan, berkelok-kelok, bahkan melalui tebing-tebing perbukitan, serta melintasi aliran sungai. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa untuk membangun sarana transportasi (khususnya kereta api) di wilayah tersebut besar sekali tantangannya, dan memerlukan biaya yang amat besar jumlahnya.

Salah satu ciri khas daerah Blitar sampai Malang ini adalah kesuburan tanahnya, terutama di daerah bagian utara. Kondisi ini dinilai akan amat menguntungkan, sehingga dimanfaatkan oleh para pemilik modal Belanda untuk membangun perkebunan-perkebunan dengan berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan. Sampai 1939 di daerah Blitar telah berdiri sebanyak 44 perkebunan<sup>1</sup> bahkan lebih.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa daerah Blitar ke timur sampai daerah Malang merupakan daerah yang secara ekonomis amat potensial, daerah yang dapat memberikan hasil bumi serta keuntungan yang besar. Belanda, oleh karenanya, memberikan perhatian khusus dan berupaya untuk mengembangkannya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian oleh para pengusaha dan Pemerintah Kolonial Belanda. Bentuk perhatian terhadap daerah tersebut antara lain dengan berusaha membuka transportasi dan komunikasi agar tidak lagi menjadi daerah yang relatif terisolasi, serta memudahkan upaya pengangkutan semua produk unggulannya. Oleh sebab itu jalan, jalan raya, jaringan kereta api dan telepon dibangun untuk menghubungkan daerah Blitar dengan daerah-daerah lainnya. Proses ini kemudian berhasil menjadikan daerah Blitar dan sekitarnya sebagai daerah penghasil keuntungan bagi penanam modal dan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada bagian lain, pembangunan jalan kereta api menuju Kota Blitar dimulai dari arah barat. Jalur ini merupakan jaringan kereta api yang akan menembus daerah bagian selatan, daerah pedalaman, dan merupakan jalur cabang dari jalur besar yang menghubungkan Surabaya-Madiun. Jalur tersebut meliputi Kertosono-Kediri (29 km), Kediri-Tulungagung (30 km). Selanjutnya dilanjutkan pembangunan jalur Tulungagung-Blitar (34 Km) diresmikan 16 Juni 1884. Sejak saat itu kereta api dapat menghubungkan Blitar-Surabaya melalui Kediri dan memperlancar pengangkutan komoditas ekspor yang dihasilkan oleh para pengusaha perkebunan.<sup>3</sup> Nyatanya, jalur tersebut dirasa belum mencukupi, sebab di sebelah timur, antara Blitar dan Malang juga tumbuh banyak perkebunan yang potensial. Hal ini yang menyebabkan Belanda harus membangun jalur kereta api yang menghubungkan Blitar-Malang, agar tersambung dengan jalur Malang-Surabaya.

Potensi perkebunan-perkebunan di Blitar dan Malang masa kolonial masih sedikit yang membahasnya secara lebih detail. Demikian juga pembangunan jaringan kereta api antara

---

<sup>1</sup> *Brinkmans Cultuur Adressboek voor Ned. Indie 1939*, hlm. 1-11.

<sup>2</sup> Ada sebuah perkebunan kopi yang diketahui bernama Tawangredjo, pada 1890 sudah berproduksi dan menjadi obyek foto koleksi KITLV Leiden No.KLV001065891, tetapi tidak terdaftar dalam *Brinkmans Cultuur Adressboek voor Ned. Indie 1939*. Periksa Nurhadi Sasmita, *Mesin Uang di Pedalaman: Industri Perkebunan di Blitar, 1900-1942* (Yogyakarta: Laksbang, 2018), hlm. 61.

<sup>3</sup> *Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indië, Jaarstatistieken over het Jaar 1927*. (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929), hlm. 229.

Blitar sampai Malang, sepertinya belum ada yang meneliti dan menulisnya secara khusus. Kaitan antara perkembangan perkebunan dengan pembangunan jalur kereta api di wilayah tersebut juga belum diteliti secara spesifik. Persoalan tersebut menjadi fokus utama artikel ini.

Persoalan menarik yang hendak dikaji adalah: (1) bagaimana perkembangan perkebunan di daerah tersebut, seberapa besar produksinya ? (2) bagaimana pengaruh perusahaan-perusahaan perkebunan terhadap pemerintah kolonial dalam membangun jalur kereta api di daerah tersebut ? Kedua persoalan tersebut diharapkan akan dapat memberikan argumentasi yang akurat untuk menjawab seberapa urgensinya jaringan kereta api untuk daerah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Geografis**

Blitar merupakan sebuah wilayah yang relatif terpencil. Hal itu disebabkan oleh posisinya yang jauh dari jalan utama yang dibangun oleh Daendels, serta berjauhan dengan kota-kota besar yang telah dihuni oleh banyak orang Belanda (Eropa), seperti Surabaya, Malang, dan Kediri. Namun demikian, tidak berarti bahwa Blitar luput dari perhatian orang-orang Belanda, terutama oleh karena potensi geografisnya yang tinggi dan dapat memberikan keuntungan ekonomis yang besar (khususnya di wilayah yang kemudian dinamakan sebagai Kabupaten Blitar). Berkaitan dengan masalah potensi ekonomi tersebut orang-orang Eropa memperhatikan secara teliti daerah-daerah potensial yang dapat menjadi sumber keuntungan mereka.

*Gemeente* Blitar secara geografis memiliki posisi penting berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian aktivitas ekonomi orang Eropa di wilayah Kabupaten Blitar. *Gemeente* Blitar menjadi pusat pengendalian perkebunan-perkebunan dan industri pengolahan (*manufacture*) yang dikembangkan oleh orang Eropa di Kabupaten Blitar. Selain itu, *Gemeente* Blitar menjadi pusat penyediaan berbagai kebutuhan perusahaan orang Eropa tersebut, baik untuk pengadaan sarana produksi maupun distribusi hasil produksi. Oleh sebab itu kemudian Belanda membangun berbagai fasilitas (khususnya bidang transportasi dan komunikasi) untuk mendukung aktivitas perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Eropa yang berdomisili di *Gemeente* Blitar.

Secara geografis *Gemeente* Blitar terletak pada koordinat 112<sup>0</sup>114' – 112<sup>0</sup>28' Bujur Timur dan 8<sup>0</sup>2' – 8<sup>0</sup>10' Lintang Selatan. Posisi ini kira-kira terletak 160 KM di sebelah selatan ibu kota provinsi Jawa Timur (Surabaya). Ketinggian rata-rata adalah 156 meter di atas permukaan laut. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 meter dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15°, bagian tengah 175 meter dan bagian Selatan 140 meter dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Dilihat dari topografinya wilayah Kota Blitar masih

termasuk dataran rendah. Suhu udara berkisar antara 28<sup>0</sup> sampai 29<sup>0</sup>C dengan tipe iklim C-3, sehingga menjadikan *Gemeente* Blitar sebagai sebuah kawasan yang beriklim relatif sejuk.<sup>4</sup>

Daerah antara Kabupaten Blitar dan Kediri sering menjadi hamparan pasir material vulkanik setelah terjadi erupsi Gunung Kelut. Material erupsi tersebut menjadi tumpukan unsur hara dan humus yang amat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Oleh sebab itu daerah tersebut merupakan daerah subur sehingga banyak orang Eropa yang membuka beberapa perusahaan besar, seperti perkebunan tembakau, kopi, singkong, agave, dan tebu.<sup>5</sup> Ke sebelah timur terhubung dengan daerah Kepanjen dan Malang dengan dipisahkan oleh beberapa daerah perbukitan dengan tebing yang relatif curam. Daerah timur ini juga subur dan banyak diusahakan oleh orang Eropa untuk usaha perkebunan tebu, teh, karet, kelapa, dan singkong.<sup>6</sup>

Wilayah Kabupaten Blitar mengelilingi wilayah *Gemeente* Blitar. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km<sup>2</sup> dengan 38,02% merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Hamparan wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata ± 243 meter di atas permukaan. Secara astronomis Kabupaten Blitar terletak di 111°40' – 112°10' BT dan 7°58' – 8°9'51'' LS.<sup>7</sup>

### **Potensi Perkebunan**

Pada paruh ke dua abad ke-19 situasi politik di negeri Belanda ditandai dengan menguatnya pengaruh kaum liberalis. Mereka berjuang untuk memperoleh kesempatan lebih luas dalam

---

<sup>4</sup> Batas dan letak koordinat itu yang berlaku sekarang (2011), setelah terjadi pemekaran wilayah (sejak tahun 1981 dan 2005) dan berbeda dengan ketika masih berupa *Gemeente* Blitar. *Kota Blitar Dalam Angka 2010*, (Blitar: BPS dan Bappeda Kota Blitar, 2010), hlm. 3 dan 7. Sumber lain menyebutkan tinggi rata-rata 170 meter, periksa T.J. Bezemer (*et.al. redacteurs*), *Oosthoek's Geillustreerde Encyclopaedie Tweede Druk Deel II* (Utrecht: A. Oosthoek, 1925), hlm. 701. Periksa *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië I* (Amsterdam: P.N van Kampen, 1861), hlm. 163.

<sup>5</sup> Dua perusahaan tebu yang besar dengan pabrik gula terdapat di Garum dan Wlingi. Pabrik tepung casava dan pengolahan agave menjadi karung terdapat di Gembongan Bendorejo Ponggok. Belanda juga memiliki pabrik minyak di Pakunden dan Sukorejo (*Gemeente* Blitar).

<sup>6</sup> Tiga perusahaan tebu yang besar dan pabrik gula terdapat di Garum (P.G. Garoem), Wlingi (P.G. Kenongo), dan Gandusari (P.G. Papok). Pabrik tepung casava yang besar juga terdapat di Kesamben dan Panggungrejo. Sebuah perusahaan perkebunan karet yang terkenal di daerah timur Blitar adalah Gondang Tapen.

<sup>7</sup> <https://www.blitarkab.go.id/>

aktivitas dan pengelolaan ekonomi di tanah jajahan. Negara dinilai tidak akan mampu menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan di tanah jajahan, karena begitu kompleks dan luasnya wilayah. Oleh sebab itu mereka menghendaki agar diberi kesempatan untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha ekonomi di tanah jajahan sekaligus mengelola daerah agar persoalan yang timbul segera dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik, serta tetap dapat memberikan keuntungan optimal bagi Belanda.

Ide pelaksanaan kapitalisasi di tanah jajahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada saat itu. Menurut Gunawan Wiradi, elemen politik yang beraliran liberal ini merasa “iri hati” karena melihat adanya keuntungan melimpah yang hanya diperoleh pemerintah melalui sistem tanam paksa. Para pemilik modal yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha tidak memiliki kesempatan memperoleh keuntungan yang melimpah seperti itu. Mereka menuntut adanya liberalisasi, yang berarti pemerintah kolonial tidak lagi memonopoli urusan ekonomi di tanah jajahan. Dengan kata lain, ekonomi harus berdasarkan undang-undang yang menjamin bahwa modal partikelir juga diberi kesempatan untuk berinvestasi secara leluasa di bidang perkebunan dan usaha lainnya.<sup>8</sup> Tuntutan mereka itu memperoleh dukungan dari beberapa pihak, sehingga akhirnya kelompok liberalis memperoleh kemenangan politik di parlemen Belanda.

Kemenangan politik kaum liberal ini melahirkan Undang-undang Agraria Kolonial dan Undang-undang Gula (1870). Jumlah kapital mereka semakin bertambah banyak dan mereka mulai berpikir untuk melakukan perluasan usaha di wilayah tanah jajahan. Kepentingan ekonomi kaum borjuasi tersebut mendukung ide liberalisme di Belanda. Dalam bidang ekonomi, gagasan ini merupakan kritik atas peran negara dalam mengatur lalu lintas pasar. Kaum borjuasi kemudian menuntut agar sistem merkantilisme negara digantikan dengan korporasi-korporasi milik partikelir. Wertheim melukiskan situasi ini sebagai berikut:

*...the bourgeoisie, which have been able to up considerable capital from the profit derived from the cultivation system, now looked for investment in the colony. The*

---

<sup>8</sup> Tri Chandra Ap., “Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970” dalam Freek Colombijn, dkk (eds.), *Kota Lama Kota Baru* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 362-363.

*cultivation system, which reserved almost all economic activities to the state, was considered an impediment to the private enterprise....*<sup>9</sup>

Penerapan undang-undang tersebut dan meluasnya pengaruh liberalisme mendorong munculnya perusahaan perkebunan dan pertambangan partikelir besar di Jawa dan Sumatra. Akibatnya struktur penguasaan modal juga mulai bergeser dengan tampilnya kelas borjuasi sebagai penopang utama bagi kinerja kapitalisme perusahaan perkebunan itu. Basis modal golongan ini semakin kuat karena keberhasilan mereka mengonsentrasikan modal dalam berbagai usaha industri.

Perkebunan-perkebunan besar dibuka di Blitar, terbentang di sekitar lereng Gunung Kelut di Blitar Utara maupun di sepanjang lembah aliran Sungai Brantas sampai di daerah Blitar Selatan. Usaha ini mendorong orang-orang Belanda untuk lebih menguasai secara intensif dan mengatur wilayah Blitar, karena memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan keuntungan besar baginya. Penanaman modal partikelir di Blitar ternyata mampu membantu memenuhi kebutuhan bahan mentah seperti karet, kopi, kakao, tebu, dan tembakau untuk pasar Eropa<sup>10</sup> bahkan juga kapas, serat nanas, kelapa, kina, teh, singkong dan cengkeh.<sup>11</sup>

Pada dekade ketiga abad ke-19 Belanda menghadapi kesulitan keuangan serius. Terjadinya Perang Jawa telah menyita sebagian besar energi Belanda karena luasnya daerah peperangan dan dahsyatnya pertempuran, serta hampir menguras habis kekayaan keuangannya. Masyarakat Jawa memandangnya sebagai perlawanan jihad untuk membela agama (Islam) sehingga mampu menarik simpati semua lapisan masyarakat dan meluas meliputi hampir ke seluruh Jawa.<sup>12</sup> Belanda juga harus menghadapi pemberontakan Belgia terhadap pemerintahan

---

<sup>9</sup> W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change* (The Hague: Van Hoeve, 1959), hlm. 57, atau dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. hlm. 44-45.

<sup>10</sup> Lihat William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar" dalam Anne Both, dkk. (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 205.

<sup>11</sup> "Daftar perkebunan-perkebunan di Kabupaten Blitar" pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar, dan penjelasan Subowo, Kasi Permodalan dan Kemitraan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar pada 31 Maret 2011 di Blitar; dan Ric Widodo, Dirut Perusahaan Perkebunan dan Perdagangan Gambar di Blitar pada 31 Maret 2011. Dalam perkembangannya, jenis tanaman di beberapa perkebunan mengalami perubahan atau diganti dengan tanaman komoditas lain sampai beberapa kali, terutama akibat erupsi Gunung Kelut.

<sup>12</sup> Belanda menyebutnya sebagai Pemberontakan Diponegoro. Peperangan besar ini berlangsung pada tahun 1825-1830 dan meliputi hampir seluruh Jawa. Belanda berjuang keras untuk

Raja Willem I. Perlawanan ini juga menimbulkan konflik bersenjata yang serius, berkaitan dengan perebutan takhta, dan terjadi peperangan besar yang berkepanjangan (1831-1839).<sup>13</sup> Akibatnya, keuangan Negeri Belanda terkuras. Pemerintah Belanda harus berjuang keras untuk menutup kekosongan kas negara agar dapat melangsungkan penyelenggaraan pemerintahan secara normal.

Gubernur Jendral Johannes van den Bosch berjasa besar dalam memulihkan keuangan negara. Atas dasar pengalamannya di Negeri Belanda, ia lebih memilih bidang pertanian untuk memajukan perekonomian dan memperbaiki keuangan negara. Ketersediaan lahan dan kesuburan tanah di Hindia Belanda memberikan keyakinan kepadanya, bahwa bidang pertanian itu akan memberikan peluang luas dan keuntungan besar dalam pembangunan perekonomian. Ia menerapkan politik Tanam Paksa untuk melipatgandakan pendapatan dan keuntungan.

Van den Bosch tidak percaya pada prinsip liberal bahwa orang akan selalu mencari keunggulan ekonomi jika mereka bebas melakukannya. Bosch tidak meyakini teori Muntinghe yang menyatakan bahwa “Biarkan petani Jawa bebas menangani urusannya sendiri dan dia akan menghiasi perbukitan dengan sawah-sawahnya”. Bosch juga tidak mempercayai prinsip yang dikemukakan oleh Nederburgh, bahwa petani Jawa terlalu malas untuk mengejar keuntungannya sendiri. Sebaliknya, Bosch yakin bahwa penduduk Kepulauan Indonesia, betapa pun inginnya mereka, terlalu tidak berpengetahuan untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa bantuan. Mereka harus dibimbing oleh penguasa, dan mereka harus diajar untuk bekerja, dan kalau tidak mau belajar, mereka harus dipaksa bekerja. Dengan membandingkan standar kehidupan petani Jawa dengan kaum papa di Negeri Belanda, Bosch berkesimpulan bahwa penghidupan petani Jawa lebih baik. Oleh karena itu kalau saja pemerintah mau

---

dapat mempertahankan Jawa dengan memadamkan pemberontakan tersebut, selain karena potensi ekonominya juga karena Jawa menjadi pusat kedudukan Pemerintahan Hindia Belanda. Peperangan ini berakhir setelah Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1830. Periksa Peter Carey, *Asal-Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh* (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 161-163.

<sup>13</sup> Baca C. A. Fyffe, *History of Modern Europe 1792-1878*. (London: 1889), khususnya Bab XVI. Juga *The American Peoples Encyclopedia Vol. 3* (Chicago: The Spencer Press, Inc., 1968), hlm. 3-315.

“mengorganisasikan” pertanian Jawa untuk mengangkatnya ke tingkat lebih tinggi, ia sekedar melaksanakan kewajibannya.<sup>14</sup>

Keyakinannya itu mendorong van den Bosch untuk mengembangkan pertanian di Jawa atau Hindia Belanda. Dengan bimbingan dan bantuan sekedarnya dari pemerintah, dengan cara memberikan pengetahuan dasar yang konstruktif, petani Jawa akan mampu mengembangkan usaha pertaniannya secara lebih baik. Pemerintah hanya menentukan jenis tanaman apa yang harus dikembangkan dan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanamannya. Sistem Tanam Paksa meliputi penetapan kewajiban atas para petani Jawa untuk menanam tanaman-tanaman komersial pada seperlima tanahnya dan mengirimkan hasilnya kepada pemerintah. Pada prinsipnya secara parsial kewajiban ini menggantikan sistem pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, walaupun dalam praktiknya kewajiban ini sering kali digabungkan.<sup>15</sup> Jaringan kekuasaan tradisional dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan program Tanam Paksa tersebut. Para bupati oleh Belanda dikembalikan pada prestise sebelumnya dalam upaya untuk mendapatkan kerja samanya. Para bupati dan pimpinan bumiputra lainnya diberi hadiah dengan suatu bagian hasil, dan fungsi mereka bersifat turun-temurun.<sup>16</sup> Kekuasaan mereka digunakan oleh Belanda untuk menjangkau masyarakat yang dilibatkan dalam Tanam Paksa sampai tingkat paling bawah, sehingga tidak harus mengangkat pegawai bangsa Belanda dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian wewenang tradisional bangsawan Jawa menjadi terikat oleh eksploitasi kolonial.

Selanjutnya Van den Bosch harus meyakinkan raja bahwa dia akan menemukan cara tepat untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor di Jawa sampai senilai 20 juta gulden setahun. Langkah-langkah khusus akan memberikan kesempatan pertama untuk menangani hasil panen kepada pedagang Belanda. Penanganan produksi dan jalinan kerja sama dengan para penguasa lokal diawasi secara ketat agar dapat memberikan keuntungan bukan saja kepada pemerintah Belanda tetapi juga kepada petani. Semua itu menjadi perhatian pemerintah di

---

<sup>14</sup> Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara, Sejarah Indonesia* (Jakarta: KPG dan Freedom Institute, 2008), hlm. 323-324.

<sup>15</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 44.

<sup>16</sup> B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Selected Writing Vol. 1* (Bandung: Sumur Bandung, 1955), hlm. 219-221. B.J.O. Schrieke, *Penguasa-penguasa Bumiputera* (Jakarta: Bhratara, 1974), hlm. 81-83.

bawah Sistem Kultur, yakni Sistem Pertanian yang dikontrol pemerintah.<sup>17</sup> Sistem ini kemudian mendorong pertumbuhan pesat perkebunan di Hindia Belanda, tidak hanya di Jawa.

Perkebunan adalah produksi pertanian secara besar-besaran, pengarahannya pasar dan berorientasi ekspor, produksi pertanian yang diadakan serta dikelola demi menghasilkan laba.<sup>18</sup> Berkaitan dengan perkembangan perkebunan swasta, menurut Houben, perkebunan adalah bagian tanah yang dibatasi, yang di atasnya pemilik swasta menggunakan penduduk setempat (sebagai penghuni sementara atau tetap) untuk memproduksi tanaman perdagangan.<sup>19</sup> Bedanya dengan pertanian yang telah dikembangkan oleh masyarakat tradisional, perkebunan menggunakan lahan yang lebih luas untuk tanaman tertentu (umumnya sejenis), serta dikelola dengan lebih modern dengan menerapkan sistem manajemen yang lebih teratur rapi.

Usaha perkebunan terbukti telah berhasil memberikan keuntungan besar bagi pemerintah. Sebelum tahun 1870 usaha perkebunan diselenggarakan oleh pemerintah, dan yang banyak diusahakan adalah penanaman tebu dengan pabrik gula, serta tanaman kopi. Penanaman tebu terus diperluas di berbagai daerah (baik di Jawa maupun Sumatra) agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Bersamaan dengan itu juga dibangun beberapa pabrik gula di beberapa sentra penanaman tebu untuk mengolah panen tebu secara optimal. Hal serupa juga dilakukan pemerintah untuk tanaman kopi. Gula dan kopi merupakan komoditas ekspor yang sangat laku di pasaran internasional. Wilayah Residensi Kediri merupakan daerah penanaman kopi dan tebu oleh pemerintah. Produksi kopi di Residensi Kediri mencapai 25.787 pikul (1856) dan 55.387 pikul (1875).<sup>20</sup> Produksi tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perkebunan yang baru dibuka oleh para pemilik modal untuk penanaman kopi, dan usia tanaman kopi yang mencapai puncak produksi. Penanaman tebu dan produksi gula di Residensi Kediri sejak 1836 sampai 1870 juga terus meningkat, dapat diperiksa dalam tabel berikut ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 324-325 dan 490-491.

<sup>18</sup> William J. O' Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar" dalam Anne Booth, William J. O' Malley, Anna Weidemann (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. (Jakarta LP3ES, 1988), hlm. 198.

<sup>19</sup> Vincent J.H. Houben, "Perkebunan-perkebunan Swasta di Jawa Abad ke-19: Sebuah Kajian Ulang" dalam J. Thomas Linblad (Editor), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 74.

<sup>20</sup> Anne Booth, William J. O'Malley, Anna Weidemann (Penyunting), *ibid.*, hlm. 216.

**Tabel 1**

**Gula Pemerintah 1836-1870. Jumlah Pabrik Gula dan Areal Penanaman Tebu di Residensi Kediri (dalam hektar)**

<b>Residensi Kediri</b>	<b>1836</b>	<b>1840</b>	<b>1845</b>	<b>1850</b>	<b>1856</b>	<b>1860</b>	<b>1865</b>	<b>1870</b>
Jumlah Pabrik	1	13	10	9	4	6	6	6
Areal Tebu	509	612	568	904	923	1.348	1.348	1.348

Sumber: Anne Booth, William J. O'Malley, Anna Weidemann (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1988), hlm. 201.

Kecenderungan peningkatan luas areal penanaman tebu di wilayah Kediri menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah potensial untuk jenis tanaman itu.

Kondisi itu berlangsung hingga memasuki abad ke-20. Undang-undang Agraria dan Undang-undang Gula tahun 1870 membuka peluang bagi para pemilik modal untuk menanamkan investasi di Hindia Belanda, antara lain dengan membuka perkebunan di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Perkembangan tersebut menunjukkan upaya keras Belanda untuk melakukan eksploitasi ekonomi tanah jajahan demi keuntungan lebih besar lagi. Oleh sebab itu para pemilik modal berlomba-lomba menanamkan investasi dalam berbagai usaha, khususnya yang berkaitan dengan perkebunan serta pengolahan hasil perkebunan.

Semakin banyak pula investasi yang ditanamkan untuk membuka perkebunan di Blitar, dengan berbagai jenis tanaman komoditas yang diusahakannya, baik dalam skala besar maupun kecil. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya jumlahnya menyusut karena terjadi persaingan ketat di antara para pemilik modal. Berbagai cara dilakukan oleh para investor besar untuk dapat mengambil alih perkebunan-perkebunan yang lebih kecil. Sejak perkebunan hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar tersebut, jenis tanaman komoditas juga menyusut, tetapi dalam areal penanaman yang lebih luas. Di antara sekian banyak perkebunan tersebut yang tertua atau paling awal diusahakan oleh Belanda adalah penanaman tebu untuk gula, yaitu oleh *Hollandsch Vereniging Amsterdam (HVA)*. Oleh sebab itu cukup banyak penanaman tebu di Blitar dan pabrik gula yang didirikan di wilayah tersebut cukup besar kapasitas

produksinya, sehingga kemudian dijangkau oleh Belanda dengan membangun jalur lori dan kereta api.<sup>21</sup>

Dalam mengembangkan perkebunan itu Belanda menerapkan dua sistem. *Pertama, bergcultuures*, yakni perkebunan-perkebunan yang diusahakan di daerah pegunungan atau perbukitan. Oleh sebab itu hampir semua daerah pegunungan di Jawa merupakan pusat-pusat perkebunan dengan berbagai jenis tanaman, contohnya di lereng-lereng Gunung Arjuno, Anjasmoro, Kelut, Kawi, Wilis, Dieng, Argopuro, dan sebagainya. Jenis tanaman di perkebunan ini adalah tanaman keras, seperti karet, kopi, teh, cengkeh, kina. *Kedua*, perkebunan di daerah-daerah dataran rendah, di daerah yang lebih datar. Biasanya jenis tanaman yang diusahakan berupa tanaman musiman, misalnya tebu, tembakau, agave dan singkong.<sup>22</sup> Kedua sistem tersebut diterapkan oleh Belanda di wilayah Blitar. Daerah-daerah di lereng Gunung Kelut di sebelah utara sampai di daerah yang lebih datar di sekitar lembah aliran Sungai Brantas, serta daerah perbukitan di Blitar Selatan yang lebih kering, telah dibuka oleh Belanda untuk mengusahakan perkebunan.

Sebenarnya terdapat lebih banyak perusahaan perkebunan yang berhasil dibuka oleh para pengusaha, tetapi data tertulis sebelum 1900 yang ditemukan menyebut dua buah perusahaan telah yang beroperasi di Blitar.<sup>23</sup> Seperti diketahui, sejak disahkannya Undang-undang Agraria 1870 para pemilik modal berlomba menanamkan modal dengan membuka perkebunan di berbagai daerah, terutama Jawa dan Sumatra. Dua perusahaan itu mengontrak tanah sebagai lahan usaha, tetapi tidak disebutkan jenis usaha yang dikembangkannya. Berdasarkan lokasi tanah yang disewanya, kemungkinan kedua perusahaan tersebut mengembangkan bidang usaha industri perkebunan. Kedua perusahaan itu adalah :

1. Perusahaan Poh Gadjie di Distrik Wlingi di bawah pimpinan O.P. Hondius, menguasai tanah persil yang berakhir masa kontraknya pada 10 Februari 1895;

---

<sup>21</sup> Informasi lisan yang diperoleh oleh Ric Widodo menyebutkan jumlah perkebunan di Blitar tersebut mencapai ratusan. Perkebunan besar tidak jarang menutup akses perkebunan kecil di sekitarnya agar mengalami kesulitan dan mati perlahan-lahan jika tidak mau diambil alih. Setelah berhasil diambil alih kemudian terjadi penyeragaman jenis tanaman. Wawancara dengan Ric Widodo di Blitar, 31 Maret 2011.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ric Widodo di Blitar, 31 Maret 2011.

<sup>23</sup> Data sebelum 1900 biasanya mencantumkan nama Kediri (Residensi Kediri) yang sebenarnya juga meliputi daerah Blitar.

2. Perusahaan Soemberingin yang berpusat di Kota Blitar dan di Srengat, di bawah pimpinan C. Bijl, dan W.D. Bijl, menguasai tanah persil seluas 358 hektar dan akan berakhir masa kontraknya pada 5 Januari 1897.<sup>24</sup>

Catatan terpenting mengenai perkebunan (khususnya sejak abad ke-19) adalah berkenaan dengan keterlibatan para pengusaha partikular Eropa (terutama Belanda). Mereka memiliki perhatian dan kemauan besar terhadap pengembangan perkebunan sebagai salah satu usaha industri yang mampu memberikan keuntungan. Kondisi ini menyebabkan munculnya perbedaan nyata antara usaha pertanian dan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Bumiputera dan yang diusahakan oleh para pengusaha Eropa. Produk penting dari usaha penanaman oleh penduduk Bumiputera adalah beras, jagung, singkong, karet, kelapa, lada, kopi, teh, kapuk, tembakau, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, gula dan berbagai jenis sayuran. Beras adalah bahan makanan terpenting bagi sebagian besar penduduk Bumiputera dan merupakan jenis tanaman paling penting dari pertanian rakyat. Beras terutama tumbuh di tanah irigasi (sawah) dan budaya ini telah mencapai tingkat tinggi pembangunan pertanian di Jawa, Bali dan Lombok, serta di beberapa daerah Sumatera. Pada 1928 sebanyak 63.561.725 kuintal diproduksi di Jawa dan Madura.<sup>25</sup>

**Tabel 2**

**Ekspor Produk Pertanian Bumiputera 1929**

<b>Komoditas</b>	<b>Nilai dalam 1000 gulden</b>	<b>Jumlah dalam ton</b>
Kopra	122,395	514,851
Karet	82,149	91,543
Kopi	48,211	70,635
Lada	43,181	24,479

<sup>24</sup> *Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië 1895 Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie*, (Batavia-Landsdrukkerij), hlm. 519. Masyarakat Blitar mengenalnya dengan nama Poh Gajih. Sejauh ini belum diketahui secara lebih jelas mengenai keberadaan dan aktivitas kedua perusahaan tersebut. Ada sebuah foto mengenai Perkebunan kopi Tawangredjo di dekat Blitar pada 1890. Foto ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak hanya dua perusahaan perkebunan yang beroperasi di Blitar pada saat itu. Lihat foto koleksi KITLV Leiden No. KLV001065891.

<sup>25</sup> *The Netherlands Indies* (Buitenzorg : Published by The Division of Commerce, Department of Agriculture, Industry & Commerce), hlm. 15.

Singkong	31,684	483,430
Teh	22,004	15,608
Kacang tanah	19,446	84,300
Kapuk	17,832	18,119
Jagung	12,950	215,919
Tembakau	28,774	5,002
Pala	4,390	4,235
Gula	3,430	30,913

Sumber: *The Netherlands Indiës*. (Buitenzorg : Published by The Division of Commerce, Department of Agriculture, Industry & Commerce), hlm. 15.

Perkebunan yang dikembangkan oleh para pengusaha Eropa menerapkan teknik sendiri secara eksklusif untuk menumbuhkan hasil pertanian pada lahan yang luas serta untuk tujuan perdagangan ekspor. Produk perkebunan antara lain tebu dan gula, karet, teh, singkong, kopi, kina, kelapa, kakao, Agave (sisal rami), dan minyak sawit. Produk lain, meskipun pada skala yang lebih kecil, untuk pasar luar negeri, yaitu gambir, rempah-rempah, minyak sereh, koka, vanili, dan sebagainya.

Pada akhir 1928, sebanyak 2.238 perkebunan di Hindia Belanda dalam produksi penuh, 1.217 terletak di Jawa dan 321 di Pantai Timur Sumatera. Luas keseluruhan perkebunan ini mencapai 1.139.319 hektar, di mana yang 677.552 hektar berada di Jawa. Industri gula, dilakukan di Jawa menempati posisi terpenting di antara semua budidaya lainnya. Industri penting berikutnya adalah karet, tembakau, teh, kopi, agave, minyak sawit, kina dan kopra. Beberapa produk pokok hasil budidaya para pengusaha Eropa pada 1928 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Gula, terdapat 178 pengusaha dengan menggarap lahan seluas 187,471 hektar, menghasilkan 254.987.817 kuintal tebu, dan 29.373.759 kuintal gula.
2. Karet, terdapat 1.009 perkebunan, 543 terletak di Jawa dan 466 di luar Jawa, terutama di Sumatera. Luas keseluruhan perkebunan ini mencapai 222.781 hektar, di antaranya 302,865 hektar di luar Jawa, yang masing-masing 148,988 hektar (Jawa) dan 199,524 hektar (luar Jawa) sudah berproduksi, menghasilkan total 140.821 ton. Hasil karet dari penduduk bumiputra sebesar 91.543 ton. Areal yang ditanami karet oleh penduduk bumiputra diperkirakan seluas 750.000 hektar, dan 200.000 hektar telah berproduksi [*sic.*].
3. Tembakau. Ada perbedaan yang jelas antara tembakau Deli dan tembakau yang dihasilkan di ujung timur Jawa (daerah Besuki) serta tembakau yang berasal dari sebagian daerah

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 17-21.

- Vorstenlanden*. Selain perkebunan tembakau milik orang-orang Eropa (menghasilkan 12.667.612 kg), tembakau juga dibeli dari penduduk bumiputra, disebut *krosok*. Produk total perkebunan tembakau adalah 52.724.622 kg, dari luas lahan 56.503 hektar. Sumatera menghasilkan sejumlah 21.243.452 kg (dari 25.380 hektar lahan).
4. Teh. Produk ini terutama tumbuh di Jawa, khususnya Jawa Barat. Sejak 1911 kebun teh di Sumatera mulai berkembang. Menjelang akhir 1928 ada 320 perkebunan teh, di mana 281 terletak di Jawa (94.170 hektar) dan 39 di Sumatera (21.067 hektar). Total produksi di Jawa (48.006 ton) dan Sumatra (9.248 ton). Budidaya teh oleh masyarakat bumiputra juga cukup penting, khususnya di Jawa Barat, menghasilkan sekitar 15.608 ton, dihasilkan dan dijual oleh mereka yang bekerja di perkebunan dan sekitarnya.
  5. Kopi. Jenis kopi unggulan adalah kopi robusta (84% dari total produksi), serta kopi Liberia yang sangat dihargai. Kopi Jawa (*Cafea Arabica*) juga ditanam. Kebun-kebun kopi oleh masyarakat bumiputra terutama terdapat di Palembang, Sumatra Selatan dan Sumatra Barat serta di daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Para pekebun kopi utama orang Eropa menetap di Jawa Timur. Pada 1928 ada 401 perkebunan kopi, 115 di antaranya terletak di Luar Jawa. Di Jawa areal yang ditanami seluas 97.357 hektar, dan yang telah berproduksi seluas 76.903 hektar. Perkebunan kopi di Luar Jawa seluruhnya seluas 29.405 hektar dan yang telah berproduksi seluas 13.925 hektar. Total produksi kopi sebesar 125.949 ton, di mana 70.635 ton (56,1%) berasal dari kebun-kebun milik bumiputra.
  6. Kina. Jawa memiliki monopoli produksi kina dunia, yaitu. 91% dari produksi dunia.

Semua jenis tanaman budidaya perkebunan tersebut juga dibudidayakan di Blitar, baik oleh orang-orang Eropa maupun masyarakat bumiputra. Dengan demikian Blitar menjadi salah satu bagian penting dalam produksi komoditas ekspor tersebut. Bahkan, selain komoditas itu di Blitar juga terdapat usaha penanaman kelapa, cengkeh, kapok, singkong, dan agave.

Banyak industri perkebunan dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar. Daerah ini menjadi makmur berkat perusahaan perkebunan Eropa yang berkembang pesat sesudah 1900 dan berimbas positif terhadap perkembangan Kota Blitar. Upaya keras yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mengoptimalkan eksploitasi kesuburan dan kekayaan alam dapat dilihat dalam sektor perkebunan itu. Kondisi kemakmuran tersebut tidak terpengaruh ketika perusahaan tersebut mengalami kemunduran pada sekitar 1920-an.<sup>27</sup> Asisten Residen Blitar, G.H. Barro, melaporkan bahwa di daerah ini terdapat 7.000 bau kebun tebu, 3 perusahaan perkebunan (kopi, teh, kina, dan karet) dengan tanah hak guna usaha, 2 perkebunan singkong dan agave, 2 perusahaan perkebunan minyak sereh yang merana.<sup>28</sup> Perkebunan tebu, kopi, dan

---

<sup>27</sup> Kemunduran tersebut terutama disebabkan oleh erupsi Gunung Kelut pada Mei 1919 yang menimbulkan kerusakan berat terhadap lahan dan tanaman perkebunan serta pabrik-pabrik pengolahannya.

<sup>28</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk (Dewan Redaksi), *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978), hlm. CXCVIII.

karet biasanya memiliki unit pengolahan produk perkebunannya sendiri. Sumber lain menyebutkan terdapat 45 perusahaan perkebunan dengan jenis-jenis tanaman pokok yang terdapat di wilayah Kabupaten Blitar dan sekitarnya, sebagai berikut.

**Tabel 3**

**Nama Perkebunan di Wilayah Blitar dan Sekitarnya dan Tanaman Pokok yang Dibudidayakannya**

<b>No.</b>	<b>Nama Perkebunan</b>	<b>Jenis tanaman utama</b>
1.	Bendoredjo	Vezzel, Cassava.
2.	Gambar	Rubber, Koffie
3.	Garoem	Suiker
4.	Gilir	Koffie
5.	Kali Gambang	Vezzel. Tapioca
6.	Kali Gentong	Cacao, Kapok
7.	Kali Tengah	Koffie, Kapok. Klapper.
8.	Karang Anjar	Koffie.
9.	Karang Nongko	Koffie.
10.	Koenir	Suiker.
11.	Kroewoek	Rubber.
12.	Maria-Anna-Charl. div.	
13.	Nglegok	Koffie.
14.	Ngoesrie (Ngeseng)	Koffie.
15.	Penataran	Rubber, Koffie, Cacao
16.	Petoeng Ombo	Rubber.
17.	Pidji Ombo	Koffie.
18.	Soember Tjangkring	Vezzel, Cassava.
19.	Swaroeboeloeroto	Koffie, Thee.
20.	Tjandi Sewoe	Koffie.
21.	Wlingi	
22.	Bantaran	Koffie.

---

23. Boemi Ajoe	Rubber.
24. Branggah-Banaran	Rubber.
25. Brintik	Rubber, Koffie
26. Djaboong	Rubber.
27. Djoelek	Rubber, Koffie.
28. Djoerang Banteng	Koffie.
29. Gabroe	Rubber. Koffie.
30. Gondang Tapen	Rubber.
31. Kali Besar	Rubber.
32. Kali Tapak I-II	Koffie.
33. Karang Redjo	Koffie.
34. Kawi Sari	Koffie.
35. Kendal Redjo	Rubber.
36. Koelonbambang	Koffie, Kina, Thee.
37. Ngisor	Koffie.
38. Njoenjoer	Koffie.
39. Rini	Rubber. Koffie.
40. Seban Kembar	Koffie.
41. Sengon	Rubber. Koffie.
42. Serigron	Rubber.
43. Sirah Kentjong	Kina.
44. Soember Gentong	Kina.
45. Telogomas	Koffie, Kina, Thee.

---

Sumber: Brinkman's, *Cultuur-Adresboek voor Nederlandsch-Indië 1939*, Soerabaja: Reis & Co, hlm. 1-11

Perusahaan perkebunan singkong dan agave Kaligambang di Distrik Lodoyo milik N.V. Landbouwindustrie, selain mendapat konsesi tanah hak guna usaha juga konsesi menyewa tanah Dinas Kehutanan berjangka panjang, konsesi menyewa tanah tegalan penduduk seluas 2.000 bau dan diberi hak membeli hasil singkong penduduk dengan kontrak seluas 1.500 bau. Konsesi tersebut sudah diperpanjang 2 tahun dan akan berakhir pada Nopember 1931. Pembelian singkong dengan kontrak praktis tidak pernah dijalankan,

meskipun perusahaan menyediakan bibit singkong untuk penduduk, tetapi penduduk tidak diwajibkan menjual hasil singkongnya kepada perusahaan. Perusahaan perkebunan ini banyak menolong penduduk Lodoyo sebab tanaman singkong perusahaan yang luas itu dapat memberantas alang-alang. Alang-alang ini sampai 1925 tetap mengganggu tanaman padi gogo dan tembakau penduduk. Pada 1924 seluruh tanaman agave milik Kaligambang terbakar musnah juga karena alang-alang.<sup>29</sup>

Tidak seperti yang terdapat di wilayah Kabupaten Blitar, industri perkebunan yang dikembangkan di wilayah *Gemeente* Blitar dalam skala yang jauh lebih kecil. Hal itu disebabkan oleh terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut, serta kebanyakan tanah dimiliki oleh penduduk. Hamparan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk areal penanaman di *Gemeente* Blitar tidak luas. Beberapa desa di Kota Blitar menjadi daerah penanaman tanaman perkebunan (khususnya tebu dan tembakau) oleh para petani pemilik lahan. Tanaman tebu banyak di bawah pengawasan P.G. Papok (di Gandusari) [*sic.*],<sup>30</sup> P.G. Garoem dan P.G. Soemberdadie, tanaman tembakau oleh beberapa perusahaan rokok (terutama berasal dari Tulungagung dan Kediri, selain Blitar sendiri) dan pengusaha Cina untuk memasok kebutuhan beberapa perusahaan rokok dan kerajinan pembuatan rokok oleh penduduk. Tanaman perkebunan di Kota Blitar diusahakan dalam bentuk pertanian rakyat.<sup>31</sup> Pertanian rakyat meliputi seluruh desa di *Gemeente* Blitar, dikembangkan secara turun-temurun dan berfokus memenuhi kebutuhan subsisten.

Namun demikian tidak berarti bahwa *Gemeente* Blitar tidak memiliki sumbangan positif terhadap perkembangan industri perkebunan. *Gemeente* Blitar menjadi bagian dari pusat pengendalian perusahaan perkebunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar, serta pusat distribusi hasil perkebunan dengan menggunakan kereta api. Selain itu *Gemeente* Blitar juga menjadi salah satu pusat penyimpanan produk perkebunan sebelum dikirimkan ke berbagai

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Koloniaal Verslag van 1917* (Gedrug ter Algemeene Landsdrukkerij), Bijlage FF. Masyarakat Blitar lebih mengenalnya dengan nama Papuh.

<sup>31</sup> Hal tersebut dikemukakan oleh sumber lisan sebab belum ditemukan sumber tertulis yang lebih rinci. Disebutkan bahwa para petani bersedia menanam tanaman perkebunan seperti tebu, dan tembakau sesuai petunjuk dari para pegawai perkebunan. Secara periodik pihak perkebunan mengadakan pemeriksaan lapang, serta memberikan pengarahan dan bimbingan konstruktif kepada para petani. Hal itu dimaksudkan agar kualitas produksinya dapat terjaga dengan baik, dan kemudian hasil panennya disetor atau dijual kepada perusahaan perkebunan. Wawancara dengan Ric Widodo, 30 Maret 2011. Wawancara dengan Mardijono Gudel, 20 September 2010. Wawancara dengan para penggiat Blitar Heritage Society, 19-20 September 2010.

daerah atau menuju ke pelabuhan ekspor. Sebuah pabrik minyak kelapa juga terdapat di *Gemeente* Blitar untuk mengolah produk perkebunan kelapa yang banyak terdapat di daerah Lodoyo, Binangun, Kesamben, dan Pangungrejo.<sup>32</sup> Bekas pusat pengendalian perkebunan di *Gemeente* Blitar selain berupa kantor perusahaan perkebunan juga beberapa gedung besar untuk menampung berbagai aktivitas, baik karyawan maupun perusahaan perkebunan. Gedung-gedung tersebut pada zamannya telah memberikan ciri modern berupa bangunan gaya Eropa pada beberapa bagian penting di *Gemeente* Blitar.<sup>33</sup> Beberapa gedung perusahaan perkebunan di *Gemeente* Blitar di antaranya berupa kantor besar perkebunan<sup>34</sup>, rumah sakit<sup>35</sup>, dan gudang. Gudang-gudang dibangun di kota dan digunakan sebagai tempat penyimpanan produksi perkebunan (sebelum dikirimkan ke luar daerah atau diekspor), juga sebagai gudang sarana produksi.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa sektor perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar memicu perkembangan lebih lanjut industrialisasi di *Gemeente* Blitar. Bermula dari aktivitas membuka dan mengembangkan usaha perkebunan itu orang-orang Belanda kemudian membangun dan mengembangkan usaha lainnya yang erat kaitannya dengan keberadaan usaha

---

<sup>32</sup> Tempat-tempat yang semula menjadi pusat kegiatan perusahaan dan pusat administrasi (pengendalian) perusahaan perkebunan sekarang sudah berubah fungsi dan beralih kepemilikannya, dibongkar dan didirikan bangunan baru yang disesuaikan dengan model bangunan baru dan kebutuhan pemilikinya. Bekas-bekas bangunan lama peninggalan perusahaan perkebunan juga sudah tidak ditemukan lagi.

<sup>33</sup> Saat ini sudah tidak ada lagi bekas kantor perusahaan perkebunan di Kota Blitar, selain dibumihanguskan pada masa revolusi, juga telah beralih kepemilikannya. Beberapa lokasi yang masih dapat dirunut adalah bekas rumah Administrator Perkebunan Kopi Karangrejo, sekarang menjadi Foto Studio Garden, di Jl. Cemara. Periksa *Notulensi der openbare vergadering Gemeenteraad van Blitar*, 14 Januari 1921. Sebuah gedung besar milik perusahaan perkebunan dan diberi nama Kedung Wringin pernah disewa pemerintah *Gemeente* Blitar sebagai Stadshuis dan kantor *Gemeenteraad van Blitar*, sekarang menjadi Kantor DPRD Kota Blitar. Periksa *Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar*, 28 Augst 1923, hlm. 12-13.

<sup>34</sup> Kompleks kantor besar tersebut sekarang menjadi kompleks Kantor PLN Kota Blitar, di Jl. Ahmad Yani. Menurut keterangan Ric Widodo kantor besar tersebut adalah pusat administrasi gabungan sebagian besar perkebunan-perkebunan di Kabupaten Blitar. Semula di kompleks gedung ini dipusatkan berbagai aktivitas administrasi perkebunan dan distribusi produk perkebunan. Wawancara dengan Ric Widodo dan Subowo di Blitar pada 31 Maret 2011.

<sup>35</sup> Semula berupa sebuah klinik dan kemudian dikembangkan menjadi rumah sakit perkebunan, dan sekarang menjadi Rumah Sakit Budi Rahayu, di Jl. Ahmad Yani.

<sup>36</sup> Dua buah gudang besar sebagai penyimpanan produk perkebunan terdapat di belakang kantor besar perkebunan, sekarang menjadi kompleks STMK Santo Yusup Blitar, Gereja GBIB, serta pemukiman penduduk (di Jl. Jendral Sudirman) serta di sebelah selatan Stasiun Kereta Api. Beberapa bagian dari kompleks bangunan gudang tersebut semula juga terdapat gudang saprodi, yakni tempat penyimpanan berbagai pupuk, obat-obatan, dan peralatan perkebunan.

perkebunan. Munculnya bank, dibangunnya jalan kereta api, jalan raya dan jembatan, perumahan dan konstruksi, jasa telekomunikasi, transportasi, perusahaan umum dan perusahaan pengolahan amat dipengaruhi oleh perkembangan perkebunan tersebut. Perkembangan sektor industri itu yang kemudian memicu perkembangan *Gemeente* Blitar.

Catatan mengenai hasil perkebunan karet yang berhasil ditemukan menunjukkan tingkat produksi di Jawa. Data tersebut menunjukkan setiap keresidenan di Jawa yang menghasilkan karet, termasuk Blitar yang menghasilkan jenis unggulan baru, yakni hasil penelitian dan pengembangan Perkebunan Gondang Tapen. Jenis tersebut terkenal dengan sebutan GT (*clone* GT, singkatan dari Gondang Tapen).<sup>37</sup> *Clone* GT menjadi andalan perkebunan keret yang dikembangkan Belanda di Hindia Belanda. Pada awal 1910 di Jawa ada sekitar 157 perusahaan, yang menanam karet, dengan luas lahan perkebunan mencapai sekitar 49.030 bau. Pada Januari 1913, jumlah perusahaan karet di Jawa meningkat menjadi 332, dengan total area perkebunan 124.398 bau (dengan sekitar 495.000 pohon tanaman). Penanaman karet di luar Jawa pada Juni 1913 seluas 28.285 bau (dengan sekitar 956.000 pohon tanaman). Data ini tidak mencakup tanah pemerintah yang ditanami karet, yang pada Januari 1913 luas totalnya 11.610 bau.<sup>38</sup>

**Tabel 4**

**Luas Perkebunan Karet di Jawa (Januari 1913)**

Residentien	Aantal ondernemingen	Hevea Brasiliensis Bouws		Ficus elastica Bouws		Castillos elastica Bouws		Manihotsoorten Bouws		Totaal Bouws
		Alleen	Gem.	Alleen	Gem.	Alleen	Gem.	Alleen	Gem.	
Kediri	38	349	7.710	934	137	9	61	518	1.246	10.964
Totaal Java	332	32.301	74.163	2.033	7.439	94	3.063	2.617	2.688	124.398

<sup>37</sup> Periksa <http://hevea.web2.sbg.org.br> dan <http://bibitkaretsumsel.blogspot.com>. Beberapa penelitian yang menunjukkan keunggulan *clone* GT antara lain dapat dilihat dalam *Avaliacao de Clones havea=iac.sp.gov.br*, atau *Clones Promissores de havea=iac.sp.gov.br*, atau *Genetic Variability for Girth Growth and Rubber Yield in Hevea Brasiliensis* dalam <http://www.scielo.br/pdf/sa/v63n3/29828.pdf>.

<sup>38</sup> *1914 International Rubbercongres met Tontoonstelling Java, Batavia, Ned. Indië Catalogus*, hlm. XXVI. Pada 1939 di Blitar terdapat 16 perkebunan karet, yaitu Gambar, Kroewoek, Penataran, Petoeng Ombo, Boemi Ajoe, Branggha Banaran, Brintik, Djaboong, Djoelek Gabroe, Gondang Tapen, Kali Besar, Kendalredjo, Rini, Sengon, Serigon. Periksa Brinkman's, *Cultuur-Adresboek voor Nederlandsch-Indië 1939*, Soerabaja: Reis & Co, hlm. 1-11

Sumber: *1914 International Rubbercongres met Tentoonstelling Java, Batavia, Ned. Indië Catalogus*, hlm. XXVI.

Dalam perkembangannya perkebunan-perkebunan di Blitar sebagian mengalami kemunduran dan dibeli oleh perusahaan perkebunan yang lebih besar. Akibatnya jumlah perkebunan berkurang, menjadi 45 perusahaan pada 1939, dan terus berkurang jumlahnya. Selain karena terjadinya seleksi alam, kalah dalam persaingan, pada 1930-an terjadi krisis ekonomi (krisis malaise). Banyak negara dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan secara serius. Sebagian perusahaan mengalami gulung tikar karena gagal mengatasi masalah keuangan. Perusahaan yang menghadapi masalah keuangan atau bangkrut kemudian dijual kepada pihak lain atau dimerger. Perkebunan di Blitar yang tercatat tetap eksis sampai masa nasionalisasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Daftar Perkebunan-perkebunan di Blitar**

No	Nama Perkebunan	± Luas Lahan (Ha)	Produk Utama
1	Gambar	898	karet, kopi
2	Tjandi Sewoe	620	Kopi
3	Karanganjar	400	Kopi
4	Karangnongko	300	Tebu
5	Panataran	390	karet, kopi
6	Swaroe Boeloeroto	620	Kopi
7	Petoengombo	450	karet, kopi
8	Rotoredjo	300	Kopi
	Kroewoek	400	Karet
9	Njoenjoer	450	kopi, karet
10	Djoerang Banteng	250	Kopi
11	Ngoesri	450	Kopi
12	Bantaran	700	Kopi
13	Kawisari	250	Kopi
14	Sirahkentjong	-	Kina
15	Pidjiombo	375	Kopi

16	Sengon	600	Kopi
17	Branggah Banaran	500	Karet
18	Kulonbambang	950	Teh
19	Gunung Njamil	2500	Kelapa
20	Gondang Tapen	850	Karet
21	Sekar Gadoeng	700	Karet
22	Banjoe Oerip	250	kelapa, randu

---

Sumber: “Data Perkebunan Kabupaten Blitar” pada Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Blitar. Data tersebut diperjelas dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Subowo dan Ric Widodo di Blitar, 31 Maret 2011.

Berkaitan dengan keberadaan perkebunan-perkebunan di wilayah kabupaten itu, Kota Blitar dapat memperoleh keuntungan tertentu. Kota Blitar memiliki peran penting, terutama berkaitan dengan distribusi sarana dan prasarana produksi untuk sebagian besar perkebunan tersebut. Jalur transportasi utama dan komunikasi harus melewati dan berada di kota. Oleh sebab itu perkebunan-perkebunan harus menyediakan fasilitas khusus untuk kepentingan tersebut, seperti kantor-kantor untuk administrasi maupun pengendalian usaha perkebunan dan gudang-gudang penyimpanan. Demikian juga akses transportasi sampai di pelabuhan ekspor, keamanan, pendidikan dan kesehatan. Semua itu memacu kemajuan dan perkembangan *Gemeente* Blitar.

### **Pembangunan Jaringan Kereta Api**

Industrialisasi di tanah jajahan (khususnya Blitar) menghasilkan produk yang laku di pasaran dunia, khususnya Eropa. Oleh sebab itu Belanda juga menyediakan berbagai fasilitas untuk memperlancar penjualan produksinya tersebut terutama untuk keperluan ekspor dari Hindia Belanda. Beberapa pelabuhan besar telah berhasil dibangunnya, seperti di Batavia, Semarang, Surabaya dan Makassar. Pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan dibantu pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil lainnya merupakan pintu untuk melakukan ekspor berbagai komoditas dari Hindia Belanda.

Blitar, meskipun telah berhasil memberikan beberapa jenis produk unggulan dan dalam jumlah yang relatif banyak, tidak memiliki pelabuhan ekspor. Secara geografis Blitar berada di daerah pedalaman, sehingga tidak memiliki akses untuk dapat melakukan ekspor secara langsung. Upaya untuk mengantisipasinya adalah dengan mengangkut komoditas dari Blitar itu ke pelabuhan-pelabuhan yang memiliki akses ekspor. Hal itu juga tidak terlalu mudah bagi

Belanda sebab secara geografis daerah Blitar dipisahkan oleh medan yang relatif berat. Oleh sebab itu Belanda harus menyediakan fasilitas penunjang berupa sarana perhubungan yang menghubungkan Blitar dengan pelabuhan serta alat-alat transportasi yang memadai untuk mengangkut berbagai produk dari Blitar. Atas dasar pertimbangan ini, Belanda membangun angkutan jalan raya, jalan kereta api, pos, telegraf, telepon serta mengusahakan tempat penyimpanan (gudang) berbagai komoditas di *Gemeente* Blitar.

Belanda harus membangun jalan raya, terutama yang menghubungkan Blitar dengan daerah-daerah luar dan pelabuhan pintu ekspor. Untuk keperluan tersebut tersebut, Belanda harus mengembangkan jalan yang menghubungkan Blitar dengan daerah di barat, utara, dan timurnya, yaitu Tulungagung, Kediri dan Malang. Tantangan berat yang dihadapi Belanda untuk menghubungkan Blitar dengan daerah-daerah tersebut adalah kondisi medan yang berbukit dengan beberapa lereng terjal, serta daerah aliran lahar erupsi Gunung Kelut. Dari Kediri dan Malang selanjutnya terhubung dengan Surabaya. Selain untuk kepentingan ekspor berbagai komoditas dari Blitar, jalan raya juga untuk memperlancar mobilitas manusia, barang dan jasa antardaerah.

Kereta api juga menjadi alternatif yang menjadi perhatian khusus Belanda untuk membuka isolasi Blitar dengan pintu ekspor serta sebagai angkutan penumpang dan barang. Akhirnya Belanda memutuskan untuk menyambungkan jalan kereta api dari Kediri menuju Blitar, baru kemudian menyambungnya ke arah Malang. Dari kedua titik tersebut langsung terhubung ke Surabaya. Penyambungan jalan kereta api dari Blitar menuju Malang dilakukan lebih belakangan karena pekerjaannya lebih berat serta memerlukan waktu lebih lama. Rute ini melalui daerah atau medan yang lebih berat, karena harus menembus beberapa daerah perbukitan terjal dan sungai yang relatif besar. Pembangunan jalur kereta api ke arah Blitar disebabkan oleh industri pertanian yang dinilai menjanjikan, dan diperkuat oleh adanya perkebunan kopi di Wlingi.<sup>39</sup>

Pembangunan jalan kereta api menuju Blitar dimulai dari arah barat. Jalur Kertosono-Kediri (29 Km) berhasil dibangun dan diresmikan pada 13 Agustus 1881, dilanjutkan dengan jalur Kediri-Tulungagung (30 Km) diresmikan pada 2 Juni 1883. Setahun kemudian

---

<sup>39</sup> *Algemene Vandendag*, 1893, hlm. 1.

dilanjutkan pembangunan jalur Tulungagung-Blitar (34 Km) diresmikan 16 Juni 1884.<sup>40</sup> Sejak saat itu kereta api dapat menghubungkan Blitar-Surabaya melalui Kediri dan memperlancar pengangkutan berbagai komoditas ekspor yang dihasilkan oleh para pengusaha perkebunan. Kereta api yang dipercaya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, ke arah timur dibangun jaringan kereta api dari Blitar menuju Malang pada 30 September 1893 (Weijerman, 1904: 84-85).

Permbangunan jalur kereta api ini juga sebagai pendorong utama berkembangnya pusat pemerintahan Blitar, khususnya pada wilayah kota. Hal ini disebabkan wilayah Blitar yang tidak lagi terisolasi. Selain itu stasiun Blitar digunakan sebagai titik awal keberangkatan kereta, baik dari arah timur (Malang) maupun wilayah barat (Tulungagung). Modernisasi transportasi dengan adanya jalur kereta ini memudahkan perpindahan barang, manusia, bahkan uang yang secara tidak langsung memicu perkembangan kota. Selanjutnya Blitar dihubungkan dengan Surabaya yang juga mengarah ke Tandjong Priok melalui titik Tjitjalengka.<sup>41</sup> Jalur ini juga menghubungkan dengan Tandjong-Priok atau dari titik Tjijalengka. Pembangunan jalur kereta api ini pada awalnya dianggarkan sebanyak 600.000 gulden, tetapi mengalami peningkatan sebanyak 1.587.000 gulden. Pada akhir keputusan ditetapkan dana yang digunakan sebesar 26.660.897 gulden.

Anggaran yang berubah-ubah ini kemungkinan disebabkan oleh panjangnya jalur antara Sidoarjo dan Blitar, yaitu 1.067 Km, dengan masa pengerjaan yang lama, yakni 4 tahun. Pembangunan jalur ini dimulai pada 16 Oktober 1880 yakni pada jalur Sidoarjo-Mojokerto dan berakhir pada 16 Juni 1884 di Blitar. Selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya tenaga ahli yang terlibat dalam pembangunan ini juga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan.<sup>42</sup>

Jalur selanjutnya yaitu dari Malang ke Blitar. Jalur ini dimulai pada 5 Januari 1896 dengan jalur Malang-Kepanjen.<sup>43</sup> Dari arah barat pembangunan jalur antara stasiun Blitar ke Wlingi dimulai pada 10 Januari 1896, kemudian dilanjutkan dengan jalur Kependjen-Wlingi 30

---

<sup>40</sup> *Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indië, Jaarstatistieken over het Jaar 1927*. (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929), hlm. 229.

<sup>41</sup> Di sebutkan dalam *Staatsblad van Nederland Indie 1878* bahwa pembangunan jalur kereta api dari Sidoarjo (di jalur Soerabaja-Pasoroean) yang menghubungkan dengan jalur Madioen dan Blitar, terus ke arah barat sampai Tandjong Priok.

<sup>42</sup> *Staatsblad van Nedelandshe Indie 1878 no 201* menyebutkan bahwa pada awalnya anggaran untuk 'pekerja lapangan' adalah 2.100.000 gulden meningkat menjadi 2.569.405 gulden.

<sup>43</sup> *Staatsblad van Nedelandshe Indie no 296*, 30 September 1893.

Januari 1897.<sup>44</sup> Jalur Malang-Blitar ini pada awalnya direncanakan dianggarkan sebesar 100.000 gulden kemudian berubah menjadi 200.000 gulden.<sup>45</sup>

Seluruh jalur kereta api yang ada di Jawa, mungkin karena alasan teknologi, sepenuhnya berada di atas tanah. Oleh sebab itu maka ketika memasuki kota harus diusahakan jalur jalan kereta api tersebut sesedikit mungkin berpotongan dengan jalur jalan utama yang ada di tengah kota. Diusahakan jalur kereta api sedapat mungkin sejajar dengan jalan-jalan utama kota, supaya tidak terjadi perpotongan atau persilangan yang membahayakan pengendara kendaraan bermotor atau pejalan kaki.<sup>46</sup>

Gudang penyimpanan komoditas diperlukan oleh pengusaha. Sebelum diangkut ke luar daerah atau diekspor, komoditas harus disimpan terlebih dahulu di suatu tempat untuk dilakukan proses akhir, menunggu angkutan atau menyelesaikan proses administrasi. Untuk kepentingan itu telah dibangun dua buah gudang besar di dekat stasiun kereta api dan di kompleks kantor besar perkebunan (De Lennepstraat). Gudang di De Lennepstraat adalah gudang terbesar karena sebagai gudang induk. Gudang tersebut merupakan gudang kerja sama atau gabungan beberapa perkebunan di Blitar.<sup>47</sup> Oleh sebab itu gudang tersebut tidak hanya menyimpan satu jenis komoditas produk perkebunan, tetapi juga beraneka ragam produk perkebunan.

Selain itu setiap perkebunan dan perusahaan pengolahan memiliki gudang penyimpanan sendiri di lokasi perusahaannya atau di dekat perusahaan itu. Seluruh hasil panen perkebunan diproses dan disimpan sementara di gudang perusahaan atau perkebunan tersebut. Pemrosesan berupa antara lain pengeringan (misalnya produk kopi, kelapa, dan teh) dan

---

<sup>44</sup> Handinoto, "Perletakan Stasiun Kereta Api Dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa Khususnya Jawa Timur Pada Masa Kolonial" dalam *Dimensi* Vol. 27 No. 2, Desember 1999, (Surabaya: Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya), hlm. 48-56.

<sup>45</sup> Keputusan ini termuat pada koran *Nederland State Courant* yang terbit pada 11 Oktober 1893.

<sup>46</sup> Tim Telaga Bakti Nusantara. *Sejarah Perkeretaapian di Indonesia*. (Bandung: 1997), hlm. 68.

<sup>47</sup> Ric Widodo sejak lama sebelum menjadi pejabat perkebunan sering mendengar cerita dari para pengelola dan pegawai perkebunan mengenai gudang gabungan tersebut. Demikian juga rumah sakit (sekarang Rumah Sakit Mardi Rahayu) semula juga merupakan sebuah klinik kesehatan, sebagai bentuk kerja sama gabungan perkebunan-perkebunan di Blitar untuk menangani masalah kesehatan maupun kecelakaan kerja yang dialami oleh para pengurus dan karyawan perkebunan. Jika tidak mampu ditangani di klinik tersebut baru pasien akan dikirimkan ke RS HVA di Pare atau ke Malang dan Surabaya. Wawancara dengan Ric Widodo di Blitar, 31 Maret 2011.

penanganan khusus lainnya (misalnya karet, tembakau dan singkong). Setelah semua produk kering atau dianggap telah siap untuk dikirim ke luar daerah, selanjutnya diangkut ke gudang besar di *Gemeente* Blitar. Dengan demikian gudang besar di *Gemeente* Blitar hanya menjadi tempat transit barang yang akan diangkut ke luar daerah atau yang akan diekspor.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai sumber dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan kebijakan pintu terbuka berdampak positif bagi perkembangan wilayah Blitar dan sekitarnya. Banyak investor yang menanamkan modalnya untuk membuka perkebunan-perkebunan di daerah antara Blitar
- b. Perkebunan-perkebunan tersebut produksinya amat banyak dan beragam. Oleh sebab itu Pemerintah Kolonial Belanda berusaha membangun jaringan kereta api yang menghubungkan Kediri – Blitar – Malang agar dapat terhubung dengan Surabaya dan pelabuhan yang dapat melayani ekspor
- c. Kereta api menjadi moda transportasi yang efektif untuk melancarkan eksploitasi wilayah Blitar dan sekitarnya

## **REFERENSI**

### **Arsip**

*Notulensi der openbare vergadering Gemeenteraad van Blitar*, 14 Januari 1921.

*Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar*, 28 August 1923.

### **Penerbitan Khusus**

*1914 International Rubbercongres met Tentoonstelling Java, Batavia, Ned. Indië Catalogus Algemene Vandendag*, 1893

*Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië I* (Amsterdam: P.N van Kampen, 1861

*Brinkmans Cultuur Adressboek voor Ned. Indie 1939*

“Data Perkebunan Kabupaten Blitar” pada Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Blitar.

*Koloniaal Verslag van 1917* (Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij), Bijlage FF.

*Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië 1895 Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie*, (Batavia-Landsdrukkerij)

*Staatsblad van Nederlandshe Indie 1878*.

*Staatsblad van Nedelandshe Indie* 1893.

*Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indië, Jaarstatistieken over het Jaar 1927.* (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929)

### **Buku dan Jurnal**

Bezemer, T.J. (*et.al.* redacteuren), *Oosthoek's Geillustreerde Encyclopaedie* Tweede Druk Deel II. Utrecht: A. Oosthoek, 1925.

Booth, Anne, William J. O'Malley, Anna Weidemann (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta LP3ES, 1988

Carey, Peter. *Asal-Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*. Yogyakarta: LkiS, 2009.

Chandra Ap., Tri. "Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970" dalam Colombijn, Freek, dkk (eds.), *Kota Lama Kota Baru*. Yogyakarta: Ombak, 2005.

Colombijn, Freek, dkk (eds.), *Kota Lama Kota Baru* (Yogyakarta: Ombak, 2005

Fyffe, C. A. *History of Modern Europe 1792-1878*. London: 1889.

Handinoto, "Perletakan Stasiun Kereta Api Dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa Khususnya Jawa Timur Pada Masa Kolonial" dalam *Dimensi* Vol. 27 No. 2, Desember 1999. Surabaya: Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya.

Houben, Vincent J.H. "Perkebunan-perkebunan Swasta di Jawa Abad ke-19: Sebuah Kajian Ulang" dalam J. Thomas Linblad (Editor), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. (Jakarta: LP3ES, 1998).

Kartodirdjo, Sartono, dkk (Dewan Redaksi), *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.

Sasmita, Nurhadi. *Mesin Uang di Pedalaman: Industri Perkebunan di Blitar, 1900-1942*. Yogyakarta: Laksbang, 2018.

Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies, Selected Writing Vol. 1*. Bandung: Sumur Bandung, 1955.

Schrieke, B.J.O. *Penguasa-penguasa Bumiputera*. Jakarta: Bhratara, 1974.

*The American Peoples Encyclopedia Vol. 3*. Chicago: The Spencer Press, Inc., 1968.

*The Netherlands Indiës*. Buitenzorg : Published by The Division of Commerce, Department of Agriculture, Industry & Commerce.

Tim Telaga Bakti Nusantara. *Sejarah Perkeretaapian di Indonesia*. 1997.

Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara, Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG dan Freedom Institute, 2008.

Wertheim, W.F. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

**Laman Internet**

<http://hevea.web2.sbg.org.br> dan

<http://bibitkaretsumsel.blogspot.com>.

<http://www.scielo.br/pdf/sa/v63n3/29828.pdf>.

<https://www.blitarkab.go.id/>

**Catatan Wawancara dengan**

Mardijono Gudel, 20 September 2010.

Wawancara dengan para penggiat Blitar Heritage Society, 19-20 September 2010

Wawancara dengan Ric Widodo, 30 Maret 2011.